

## ABSTRAK

**ALDITO ROMARGI SULAIMAN, E.1910876, "Kepastian Hukum Status Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah: Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor".** Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2023.

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah merupakan aset paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah diberikan wewenang dalam mengelola aset milik daerah atas asas otonomi daerah, maka daripada itu pengelolaan aset daerah sepenuhnya tanggungjawab pemerintah daerah. Pengelolaan aset milik pemerintah daerah kabupaten bogor atas tanah dan bangunan dalam pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan belum berjalan dengan baik terutama dalam kepastian hukum status tanah dan bangunan. Dalam aset daerah berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah kabupaten bogor memiliki 5.822 bidang, aset yang sudah memiliki sertipikat berjumlah 3.357 bidang sedangkan ada 2.465 bidang belum bersertipikat yang mana hal ini merupakan suatu masalah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan mencari data dengan tahapan penelitian dengan melakukan wawancara (*interview*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aset daerah Kabupaten Bogor berupa tanah dan bangunan tidak terlaksana sesuai aturan sehingga belum dapat mewujudkan kepastian hukum. pemerintah daerah seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, sehingga dalam mengelola aset daerah dapat memberikan keuntungan dan adanya kepastian hukum agar tidak terjadi konflik dan sengketa dalam pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Status Tanah, Pemerintah Daerah

## **ABSTRACT**

**ALDITO ROMARGI SULAIMAN, E.1910876, “Legal Certainty on the Status of Land and Buildings Owned by Local Governments: A Study in the Regional Government of Bogor Regency”.** Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2023.

government. The local government has been given the authority to manage regional assets on the principle of regional autonomy, therefore the management of regional assets is fully the responsibility of the regional government. The management of assets belonging to the Bogor Regency regional government on land and buildings in securing, utilizing and maintaining them has not gone well, especially in terms of legal certainty of the status of land and buildings. In regional assets in the form of land and buildings owned by the regional government, Bogor Regency has 5,822 fields, assets that already have certificates totaling 3,357 fields, while there are 2,465 fields that have not been certified, which is a problem. The approach method used is normative juridical or also called the statute approach and searches for data with research stages by conducting interviews (interviews). The results of the study show that the regional assets of Bogor Regency in the form of land and buildings are not implemented according to the regulations so that legal certainty cannot be realized. the regional government should carry out its duties in accordance with predetermined rules, so that in managing regional assets it can provide benefits and there is legal certainty so that conflicts and disputes do not occur in the management of regional assets in the form of land and buildings.

**Keywords:** *Legal Certainty, Land Status, Local Government*